

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi program manajemen Bimbingan dan Konseling di MTsN 1 Lebak dan MTsN 4 Lebak menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan pendekatan manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), dapat disimpulkan bahwa program telah dilaksanakan secara formal dan mendasar, namun masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal efektivitas, kualitas pelaksanaan, sistem pendukung, dan keberlanjutan layanan.

1. Komponen *Context*

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan program BK di kedua madrasah belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan peserta didik yang terukur. Identifikasi masalah siswa masih dilakukan melalui observasi umum dan diskusi informal, tanpa menggunakan instrumen asesmen yang baku seperti angket gejala masalah, survei minat-bakat, atau alat penilaian psikososial. Hal ini

menyebabkan perencanaan program bersifat normatif dan repetitif, kurang adaptif terhadap dinamika perkembangan peserta didik. Organisasi dalam konteks ini juga belum menunjukkan kolaborasi lintas peran, karena guru BK bekerja secara mandiri tanpa koordinasi rutin dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Pelaksanaan konteks belum berhasil membangun pemahaman siswa terhadap pentingnya layanan BK, yang pada akhirnya memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi dalam program. Di sisi controlling, tidak ditemukan sistem evaluasi konteks yang valid, dan refleksi terhadap kesesuaian program dengan kondisi riil siswa belum terdokumentasi dan belum menjadi dasar dalam perencanaan berikutnya.

2. Komponen *Input*

Guru BK di kedua madrasah telah memiliki kualifikasi akademik yang relevan, namun belum mendapatkan pelatihan lanjutan atau peningkatan kapasitas yang terstruktur. Perencanaan pengembangan

kompetensi guru BK belum menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu madrasah. Sarana layanan BK seperti ruang konseling, alat peraga, dan media digital masih terbatas dan tidak memadai untuk menjawab kompleksitas masalah siswa di era digital. Pengorganisasian input tidak membentuk sistem pendukung yang melibatkan unsur lain, seperti guru kelas, tenaga kependidikan, atau bahkan komite sekolah. Guru BK masih menangani semua tahapan layanan secara sendiri, yang membuat pelayanan tidak maksimal secara jangkauan maupun kedalaman. Pelaksanaan input juga belum berbasis teknologi atau metode interaktif yang relevan dengan karakter siswa. Kontrol terhadap input masih bersifat administratif dan belum menggunakan indikator atau data pemanfaatan sumber daya secara sistematis, sehingga belum mampu menghasilkan strategi perbaikan berbasis *bukti (evidence-based)*.

3. Komponen *Process*

Perencanaan kegiatan layanan telah disusun melalui Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), tetapi belum disesuaikan dengan kondisi psikososial siswa yang terus berkembang. Perencanaan belum mengakomodasi diferensiasi pendekatan untuk masing-masing jenjang kelas atau kategori permasalahan. Pelaksanaan proses juga belum didukung oleh SOP layanan yang terstandar, sehingga guru BK menjalankan program berdasarkan intuisi dan pengalaman pribadi, tanpa pedoman teknis yang dapat menjamin konsistensi layanan. Layanan yang dilaksanakan masih konvensional, cenderung monoton, dan belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai media interaktif. Akibatnya, banyak siswa yang tidak merasa terlibat atau terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Proses controlling juga belum terbangun dengan baik, karena tidak ada monitoring yang dilaksanakan oleh kepala madrasah atau tim pengawas BK. Evaluasi proses hanya berfokus pada jumlah kegiatan yang dilakukan,

bukan pada kedalaman dan kualitas intervensi, serta tidak ada tindak lanjut yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

4. Komponen *Product*

Baik MTsN 1 maupun MTsN 4 Lebak belum menyusun indikator keberhasilan program secara eksplisit. Tujuan program disusun secara umum, seperti “meningkatkan kesejahteraan siswa” atau “membantu menyelesaikan masalah”, tanpa definisi operasional dan kriteria hasil yang terukur. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi secara objektif apakah program BK telah mencapai target yang diharapkan. Pengorganisasian hasil hanya tampak dari laporan kegiatan yang bersifat administratif, tanpa ada dokumentasi perubahan perilaku siswa atau pelacakan dampak jangka panjang dari layanan yang diberikan. Implementasi hasil juga belum terstruktur; meskipun ada siswa yang mengalami perubahan positif, capaian tersebut tidak terdokumentasi secara sistematis, dan tidak digunakan sebagai bahan

perbaikan program. Sistem controlling terhadap hasil juga sangat lemah, karena tidak tersedia evaluasi berbasis indikator hasil, tidak ada pelibatan stakeholder dalam penilaian hasil, dan tidak ada strategi tindak lanjut yang jelas terhadap siswa yang memerlukan layanan lanjutan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa program manajemen Bimbingan dan Konseling di kedua madrasah telah berjalan secara administratif dan formal, namun belum menyentuh substansi penguatan karakter siswa secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan berbasis data, pengorganisasian yang tidak kolaboratif, pelaksanaan yang belum inovatif, dan controlling yang belum berbasis indikator. Ke depan, diperlukan penguatan di semua aspek manajemen layanan BK agar peran BK tidak hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai jantung dari sistem pembinaan peserta didik yang transformatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata.

B. Saran

1. Context

a. Planning:

Guru BK diharapkan menyusun perencanaan program layanan yang berbasis pada hasil asesmen kebutuhan peserta didik secara sistematis. Untuk itu, perlu dikembangkan instrumen asesmen seperti angket kebutuhan layanan, skala kecemasan, atau survei minat belajar yang disesuaikan dengan konteks madrasah. Pihak madrasah perlu memfasilitasi pelatihan bagi guru BK dalam merancang dan menggunakan instrumen tersebut.

b. Organizing:

Disarankan kepada kepala madrasah agar membentuk tim pendukung layanan BK yang melibatkan guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga kependidikan. Tim ini bertugas mengoordinasikan dukungan dalam proses identifikasi masalah siswa, tindak lanjut layanan, dan evaluasi hasil. Struktur tim juga akan memperkuat sinergi antara layanan BK dan sistem pembelajaran.

c. *Actuating:*

Penting dilakukan kampanye layanan BK secara berkelanjutan melalui media cetak, daring, maupun pendekatan langsung kepada siswa dan orang tua. Hal ini akan membangun pemahaman bahwa layanan BK bersifat preventif dan pengembangan potensi, bukan hanya menangani siswa bermasalah. Layanan perlu dirancang agar lebih fleksibel, komunikatif, dan tidak kaku.

d. *Controlling:*

Kepala madrasah perlu menyusun kebijakan evaluasi program BK yang memuat indikator konteks layanan, termasuk kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan riil siswa. Supervisi dan monitoring oleh pengawas BK sebaiknya dilaksanakan secara berkala, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

2. Input

a. *Planning:*

Rekomendasi utama adalah pentingnya menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan sarana layanan BK secara berkelanjutan. Perlu ada agenda pelatihan tahunan untuk guru BK, baik dalam bentuk seminar, kursus daring, atau kerja sama dengan lembaga psikologi dan konseling. Perencanaan input juga harus memasukkan aspek digitalisasi layanan untuk mendukung pembelajaran abad ke-21.

b. *Organizing:*

Madrasah perlu mengelola input secara terpadu, termasuk menyusun inventaris kebutuhan fasilitas layanan, membentuk unit kerja kecil pendukung layanan BK, serta mengintegrasikan sistem layanan dengan agenda sekolah. Pembagian tugas dan pelibatan pihak eksternal seperti psikolog, tenaga medis, atau konselor mitra dapat memperkuat cakupan dan efektivitas layanan.

c. *Actuating:*

Pelaksanaan input harus dilakukan secara kreatif dan adaptif. Guru BK sebaiknya menggunakan media interaktif seperti video edukatif, simulasi kasus, aplikasi asesmen online, serta modul-modul pengembangan diri siswa. Hal ini akan menjadikan layanan lebih menarik dan dekat dengan karakter siswa digital-native.

d. *Controlling:*

Diperlukan instrumen monitoring terhadap pemanfaatan sumber daya layanan, baik dari segi SDM, sarana, waktu, maupun anggaran. Kepala madrasah dan guru BK dapat menyusun format pelaporan pemanfaatan input yang bisa dikaji secara kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan refleksi bersama di akhir tahun.

3. *Process*

a. *Planning:*

Disarankan agar rencana layanan disusun secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa di setiap jenjang kelas. Perlu adanya penyusunan RPL yang membedakan

pendekatan layanan untuk siswa kelas VII, VIII, dan IX sesuai tahap perkembangan dan tantangan yang mereka hadapi.

b. *Organizing:*

Organisasi pelaksanaan proses layanan perlu diperkuat dengan *SOP (Standard Operating Procedure)* layanan yang dirancang sesuai standar layanan konseling nasional. SOP tersebut harus menjadi pedoman bagi guru BK dan tim pendukung dalam melaksanakan layanan yang profesional, konsisten, dan terukur.

c. *Actuating:*

Guru BK perlu menerapkan pendekatan pelaksanaan layanan yang bervariasi, berbasis aktivitas siswa, dan menyenangkan. Penggunaan teknik seperti konseling berbasis naratif, pendekatan mindfulness, pelatihan keterampilan sosial, dan simulasi karier sangat direkomendasikan untuk meningkatkan dampak layanan terhadap perkembangan siswa.

d. *Controlling:*

Perlu adanya monitoring proses layanan yang dilakukan secara kolaboratif antara guru BK, kepala madrasah, dan guru kelas. Monitoring dapat dilakukan melalui observasi langsung, rekaman pelaksanaan, dan umpan balik siswa. Hasil monitoring harus ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan strategi layanan secara berkala.

4) *Product***a. *Planning:***

Tujuan layanan BK perlu disusun dalam bentuk hasil yang dapat diukur, seperti peningkatan kemampuan manajemen diri, keterampilan sosial, dan pemahaman karier. Setiap jenis layanan harus memiliki indikator hasil yang dirancang secara realistis, dan selaras dengan visi misi madrasah.

b. *Organizing:*

Perlu dibentuk sistem dokumentasi hasil layanan yang mencakup portofolio siswa, catatan perkembangan perilaku, dan evaluasi dampak layanan. Laporan hasil tidak

hanya mencantumkan kuantitas kegiatan, tetapi juga menampilkan kualitas perubahan yang dialami siswa berdasarkan observasi dan refleksi.

c. *Actuating:*

Guru BK disarankan untuk menyusun laporan evaluasi hasil layanan yang dianalisis secara tematik. Siswa yang menunjukkan perkembangan positif perlu diakui sebagai bagian dari keberhasilan layanan, dan dijadikan contoh inspiratif bagi siswa lain. Hasil layanan juga harus dijadikan rujukan dalam merancang program BK tahun berikutnya.

d. *Controlling:*

Kepala madrasah dan pengawas BK perlu melakukan evaluasi hasil secara berkala melalui rapat evaluasi tahunan yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Sistem controlling hasil sebaiknya berbasis data dan digunakan untuk menilai efektivitas layanan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan madrasah.